



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Masyarakat Sipil Minta Hentikan Pembahasan
Tanggal	: Senin, 17 Maret 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 1-15

REVISI UU TNI

Masyarakat Sipil Minta Hentikan Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Proses revisi UU TNI juga dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil serta terkesan terburu-buru, elitis, dan sangat eksklusif.

Terkait hal itu, pemerintah dan DPR diharapkan menghentikan terlebih dahulu pembahasan revisi UU TNI. Langkah ini untuk memberi ruang adanya analisis secara komprehensif dan partisipatif.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk "Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM, dan Kebebasan Akademik" oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, serta Serikat Pekerja Kampus, Minggu (16/3/2025).

Hadir dalam acara tersebut, Satria Unggul Wicaksana P (Universitas Muhammadiyah Surabaya/KIKA), Saiful Mahdi (Unsyiah/KIKA Chapter Aceh); Elvira Rumkabu (Papua Democratic Institute/KIKA Chapter Papua); Bivitri Susanti (STIH Jentera/CALS); Herdiansyah Hamzah (Universitas Mulawarman/CALS); Susi Dwi Harijanti (Guru Besar FH Universitas Padjadjaran/CALS); dan Fajri Nursyamsi (PSHK Indonesia).

Profesionalisme TNI

Bivitri menuturkan, Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan, TNI yang terdiri Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat sebagai alat negara, bukan lembaga negara.

Dalam merevisi UU TNI, lanjut Bivitri, harus dilihat urgensi dan kebutuhan TNI itu sendiri. Apalagi, saat ini Indonesia bukan berada dalam wilayah peperangan. Oleh karena itu, jika sekarang ingin mengubah UU TNI, harus dilakukan untuk profesionalisme tentara, terutama dalam konteks peradilan militer.

Bivitri meminta pembahasan revisi UU TNI dihentikan terlebih dahulu. Ia juga meminta agar dapat dilakukan analisis secara komprehensif dan secara partisipatif. "Harusnya dikaji lebih mendalam, diberikan kebijakan yang lebih komprehensif. Jadi, kita butuh waktu yang lebih untuk membicarakan ini secara partisipatif," katanya.

Satria Unggul Wicaksana mengatakan, UU No 34 Tahun

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)



Masyarakat Sipil Minta Hentikan Pembahasan

(Sambungan dari halaman 1)

2004 tentang TNI merupakan amanah reformasi. Dwfungsi ABRI di masa Orde Baru telah menimbulkan efek buruk pada kondisi masyarakat sipil di Indonesia. Ia tidak menginginkan kondisi itu kembali terulang.

Herdiansyah Hamzah menuturkan, revisi UU TNI, yang antara lain akan memperluas jabatan sipil yang dapat di-duduki perwira TNI aktif, tak hanya mengancam supremasi sipil, tetapi juga dapat menggerus profesionalisme dan independensi TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, melalui siaran persnya, juga mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan revisi UU TNI.

DPR dan Presiden diminta terbuka dan memastikan ruang partisipasi bermakna masyarakat. Selain itu, juga me-

mastikan revisi UU TNI untuk memperkuat agenda reformasi TNI dalam kerangka tegaknya supremasi sipil, konstitusi, demokrasi, dan pelindungan hak asasi manusia (HAM).

Penghentian pembahasan revisi UU TNI juga dituntut oleh 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi HAM Internasional. Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

Sementara itu, kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di kawasan Jakarta Pusat didatangi orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari. Peristiwa itu terjadi setelah aktivis Kontras yang tergabung dalam Koalisi Ma-

syarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berunjuk rasa ketika rapat pembahasan revisi UU TNI di sebuah hotel di Jakarta beberapa jam sebelumnya.

Andrie Yunus dari Kontras menuturkan, dirinya turut mendatangi rapat pembahasan revisi UU TNI pada Sabtu (15/3) sore untuk meminta agar pembahasan revisi UU itu dihentikan.

Tugas pokok

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan, revisi UU TNI untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revisi UU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain. Selain itu, juga me-

rupakan penyesuaian dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

Aturan batas usia pensiun prajurit TNI, menurut Hariyanto, bertujuan agar prajurit dapat berkontribusi bagi negara sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

"Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdikan dirinya tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI," kata Hariyanto.

Hariyanto menegaskan, revisi UU TNI menjunjung tinggi supremasi sipil. TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil. Hal ini dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.

(DYT/EDN/NAD/WIL)